

Bab 5

PENUTUP

Dalam melaksanakan strategi pertahanan maritim yang sementara ini menggunakan SPLN suatu hal yang penting dihadapi ke depan adalah tantangan dimana Malaysia SPMInya sudah menggunakan komprehensif strategi. Yang melibatkan semua aktor baik sipil maupun militer baik kondisi damai maupun perang dengan komponen-komponennya. Dan apabila perlu Malaysia akan menggunakan *defence arrangement*-nya dengan operasi Koalisi seperti zaman konfrontasi Malaysia yang dibantu Inggris dan Australia. Namun dalam penelitian ini FPDA diasumsikan tidak akan membantu. Tantangan ke depan itu mencakup ops. Gabungan, peran non-state aktor, pelibatan lintas sektoral, adaptasi dari penggunaan teknologi utk tujuan militer dan adopsi dari pemikiran *effect base operation* maupun teknologi-teknologi lainnya. Sepanjang Indonesia tidak dapat memenuhi tantangan-tantangan ke depan baik nantinya menggunakan teori Mahan maupun Corbett akan mengalami kesulitan-kesulitan.

Tantangan bagi SPMI ke depan disamping pelaksanaan Operasi Gabungan menghadapi ancaman tradisional dan non-tradisional juga dibutuhkan disiplin yang kuat, *skill* dan profesionalisme militer agar mampu bertempur sesuai dengan tugasnya di bidang pertahanan. Dari kenyataan yang ada baik Malaysia maupun Indonesia bertekad untuk mengamankan kepentingan nasionalnya masing-masing di Ambalat dalam arti masih butuh waktu yang panjang karena keduanya sama-sama berpendirian memiliki Ambalat. Dalam hal ini provokasi datang dari Malaysia yang merasa lebih kuat sehingga melanjutkan obsesinya sebagai lanjutan dari Sipadan Ligitan untuk ekspansi teritorial ke wilayah Ambalat. Implikasi tersebut dapat dijelaskan melalui beberapa implikasi diantaranya implikasi Mahan dan Corbett.

Implikasi teori Mahan, yaitu untuk melaksanakan teorinya membutuhkan kekuatan yang besar dengan 6 komponennya. Sekarang tidak bisa dilaksanakan lagi. Untuk tahun 2000 ke atas kekuatan itu tidak dilaksanakan lagi, perkembangan terbaru adalah litoral warfare (pertempuran mendekati pantai) sehingga untuk sekarang ini sulit untuk melaksanakan Mahan terutama dalam *command of the sea*. Utamanya untuk negara-negara besar seperti Amerika yang

lebih mementingkan *power projection*, *litoral warfare* dan *expeditionary* serta *naval presence*. Amerika telah memodifikasi teori Mahan dan Corbett menjadi kekuatan yang lebih efektif di laut sebagai instrumen pertahanan. Namun demikian untuk negara-negara dengan *small* dan *medium* power termasuk Indonesia teori Mahan dan Corbett masih valid untuk dilaksanakan sesuai dengan kemampuan yang ada. Dengan demikian ini akan menjawab hipotesa Mahan **Penguatan SPLN akan terjadi jika Indonesia mendayagunakan geografi, posisi wilayah, jumlah dan karakter penduduk, watak bangsa dan sikap pemerintah yang berorientasi maritim (*Archipelagic Oriented*) guna menghadapi provokasi Malaysia** bisa diterima dengan kebijakan dan strategi serta upaya dan RPJMN TNI AL (MEF) 2010-2024 sesuai uraian yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam uraian pada bab ini. Implikasi lain penguasaan laut mutlak sulit dilaksanakan sehingga diganti pengendalian laut. Apabila kekuatan yang dibutuhkan Mahan terpenuhi berarti pengendalian laut bisa dilaksanakan dengan baik, kalau tidak itu akan sulit dilaksanakan dalam menyelesaikan konflik di Ambalat sehingga SPLN tidak akan kuat.

Sementara itu implikasi Corbett terhadap SPLN guna menghadapi provokasi Angkatan laut Malaysia di Ambalat adalah, Teori Corbett untuk *naval strategy* itu lebih cocok digunakan sehingga lebih cocok untuk SPLN. Kondisi sekarang ini untuk aplikasi teori Corbett dari komponen *decisive battle*, *Fleet in Being* dan blokade yang bisa dilaksanakan hanya *Fleet in Being*, implikasinya SPLN kurang kuat untuk mendukung teori Mahan sehingga apabila menghadapi kekuatan sebenarnya dari Malaysia *Decisive battle* dan blokade tidak bisa dilaksanakan, sehingga rawan untuk Indonesia. Dengan demikian hipotesa Corbett yang menerangkan **SPLN sebagai strategi pertahanan maritim Indonesia dilaksanakan dengan penggelaran kekuatan TNI AL untuk melaksanakan pengendalian laut dengan kemampuan melaksanakan *Decisive Battle* dan *Blokade (Blockade)*, *Disputing Command* yang terdiri dari *Fleet in Being (Armada Siaga)* dalam menghadapi provokasi Malaysia** dapat diterima dengan penguatan alutsista TNI AL sesuai RPJMN (MEF) 2010-2024 dan kebijakan strategi, upaya sesuai uraian selanjutnya di bab ini. SPM *Fleet in Being*

merupakan strategi yang paling tepat dalam menghadapi provokasi Malaysia di Ambalat.

Implikasi lainnya, pada pelaksanaannya TNI tidak melaksanakan Operasi Gabungan yaitu operasi laut gabungan sesuai Skep no.163 2008, TNI AL melakukan operasi sendiri begitu juga dengan Angkatan Udara. Padahal dalam operasi sekarang ini dan ke depan untuk lebih efisien dilaksanakan secara gabungan baik darat, laut, udara. Dalam kondisi ini teori Corbett yang mengatakan bahwa kekuatan Angkatan Laut (*naval strategy*) ada hubungannya dengan kekuatan/peperangan di darat dan penyerangannya dilaksanakan secara ofensif defensif tidak bisa dilaksanakan sehingga kalau dipandang dari SPM secara menyeluruh maka SPLN lemah.

Sedangkan untuk kebijakan, strategi dan upaya dalam menghadapi provokasi Malaysia di Ambalat, dari kebijakan pemerintah yang harus diambil adalah mendorong penambahan anggaran untuk memperkuat Angkatan Laut yang memadai, melaksanakan kebijakan secara komprehensif dengan DIME dalam menanggulangi Ambalat, melengkapi sarana prasarana sesuai komponen Mahan untuk mendukung Ambalat, dan memperkuat pengamanan perbatasan guna tetap utuhnya NKRI.

Sedangkan untuk strategi dalam upaya melaksanakan kebijakan tersebut dibutuhkan strategi komprehensif, antara lain:

- 1) Meningkatkan penguatan SPMI
- 2) Melaksanakan strategi komprehensif, DIME
- 3) Meningkatkan kekuatan pertahanan di Ambalat
- 4) Penetapan perbatasan laut Ambalat

Upaya-upaya yang dilakukan dalam melaksanakan strategi diatas, dilakukan sebagai berikut:

1. Untuk penguatan SPMI maka dilakukan upaya sebagai berikut;
 - a. Menetapkan SPMI sebagai bagian dari strategi pertahanan negara, bisa berupa penetapan SPLN atau membuat SPMI yang baru
 - b. Memperkuat komponen Mahan berupa pemerintah yang punya perhatian pada maritim, meningkatkan sarana prasarana

pelabuhan seperti di Bitung, Balikpapan, Tarakan, Toli-toli), meningkatkan sarana prasarana pangkalan Aju TNI AL, meningkatkan sistem pengendalian laut melalui operasi kehadiran KRI dan pesud (naval presence di Ambalat), melaksanakan Gun boat diplomacy di Ambalat, meningkatkan IMSS di Ambalat dengan UAV, pengamatan satelit dan pemasangan radar-radar pantai, melaksanakan operasi Gabungan baik kondisi damai atau perang dengan melibatkan AU dan AD

2. Untuk melaksanakan strategi komprehensif, DIME sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan diplomasi dengan kebijakan luar negeri yang ditetapkan oleh presiden, dilaksanakan oleh Deplu dalam prosesnya melibatkan masyarakat dan TNI (khususnya TNI AL)
 - b. Melaksanakan diplomasi Militer "*Gun Boat Diplomacy*"
 - c. Meningkatkan kapasitas peran intelejen dan sistem informasi nasional, khususnya dalam menghadapi Ambalat dan masalah perbatasan lainnya.
 - d. Meningkatkan operasi Gabungan dan operasi Terpadu (dengan melibatkan polisi, Bea Cukai) dalam rangka pengendalian Ambalat, memperkuat ekonomi dan meningkatkan budget pertahanan agar mempunyai dampak deterrence.
 - e. Meningkatkan kemampuan psikologi peperangan dan hukum perang, juga hukum-hukum lainnya dalam masalah Ambalat.
 - f. Membuat RUU komponen cadangan dan pendukung, mobilisasi dan demobilisasi menjadi UU yang mencakup pengamanan Ambalat.
3. Upaya melaksanakan strategi peningkatan kekuatan pertahanan di Ambalat adalah dengan cara meningkatkan kekuatan alutsista, meningkatkan dukungan fasilitas di pelabuhan sebagai pangkalan aju, meningkatkan kemampuan TNI AU dengan penambahan alutsista baru, memperkuat TNI AD terutama yang di wilayah perbatasan

4. Upaya melaksanakan strategi penetapan perbatasan laut Ambalat adalah sebagai berikut:
 - a. Membuat Peta perbatasan laut di Ambalat untuk mengimbangi peta yang dibuat Malaysia secara sepihak
 - b. Indonesia membuat peta kedaulatan dan segera didaftarkan ke PBB
 - c. Melanjutkan perundingan perbatasan dgn Malaysia
 - d. Menyiapkan hukum dan perundang-undangan (legislasi) ttg Ambalat milik NKRI
 - e. Memberikan konsesi atau ijin kepada perusahaan-perusahaan asing yang melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi di Ambalat

Maka kontribusi Mahan dan Corbett kepada SPLN adalah:

1. Teori Mahan dan Corbett keduanya memberikan dukungan yang positif terhadap strategi pertahanan maritim (SPLN)
2. Keberhasilan SPLN terlihat apabila Ambalat tetap dapat dikontrol, jalur perdagangan dikuasai
3. Pengakuan ijin perusahaan-perusahaan asing tetap pada Indonesia dan Malaysia tidak melanggar wilayah kedaulatan di Ambalat
4. Keberhasilan mengontrol dan menguasai Ambalat memberi kontribusi terhadap utuhnya wilayah NKRI
5. Indikator keberhasilan berikutnya adalah, berkurangnya provokasi Malaysia di Ambalat

Kesimpulan dari pembuatan tesis ini adalah:

1. Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan kepada bangsa Indonesia membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia untuk menyelenggarakan 4 fungsi pokok pemerintahan yaitu fungsi pertahanan keamanan (melindungi segenap bangsa Indonesia), fungsi ekonomi (dan untuk memajukan kesejahteraan umum), fungsi sosbud (mencerdaskan kehidupan bangsa), fungsi politik (ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian dunia

dan keadilan sosial). Penyelenggaraan keempat fungsi pokok pemerintahan melalui pembangunan nasionalnya sangat tergantung pada kondisi objektif yaitu ciri geografi. Bila wilayah Indonesia seluruhnya berupa daratan maka visi atau orientasi pembangunan nasional adalah land based oriented. Namun kondisi objektif wilayah Indonesia adalah kepulauan (pulau-pulau dan laut) maka sudah tentu visi dan orientasi pembangunan nasionalnya adalah archipelagic/maritime base oriented.

2. Di dalam pelaksanaannya, TNI AL menggunakan SPLN sebagai SPMI yang beroperasi secara mandiri tidak secara gabungan. TNI tidak melaksanakan Ops. Gabungan dgn asumsi kondisi masih aman dan pemerintah lebih mengedepankan diplomasi, hal ini akan merugikan Indonesia karena Malaysia lebih piawai dalam melaksanakan diplomasi. Beroperasinya TNI AL menggunakan teori Corbett, Mahan dan benchmark kepada perkembangan strategi AL masa kini.
3. Baik strategi maritim Mahan maupun Corbett keduanya digunakan oleh TNI AL dalam kondisi saling mendukung dan belum mendekati ideal atau masih dalam tataran MEF yang di TNI AL masih pada taraf Green Water Navy terbatas yaitu mampu mengatasi 2 trouble spot termasuk di Ambalat. Realitasnya komponen Mahan tidak terlalu kuat, demikian juga komponen Corbett yang hanya dapat melakukan Fleet in Being. Implikasi dari 2 strategi ini yang sama-sama diterapkan oleh Malaysia, deterrence strategi Indonesia terhadap Malaysia tidak akan berhasil. Kekuatan lain yang mendukung strategi Mahan yaitu dengan DIME dimana dukungan masyarakat untuk melaksanakan jihad terhadap Malaysia sebagai semangat persatuan dan kesatuan untuk melaksanakan bela negara yang merupakan pusat kekuatan bangsa dapat digunakan untuk memaksa Malaysia berpikir ulang terhadap provokasinya di Ambalat.
4. Aplikasi dalam perang modern, SPLN lebih kepada naval strategy, sebagai SPMI belum mendapat pengakuan dari Dephan atau masih

sepihak TNI AL karena Dephan baru membuat strategi pertahanan negara sedangkan pemahaman SPMI yang merupakan implementasi dari strategi pertahanan negara di laut secara substansial belum dapat diaplikasikan karena secara legal formal belum terstruktur di dalam strategi pertahanan negara

5. Penelitian ini mendukung teori Mahan tetap bisa digunakan dalam SPLN dengan penguatan komponennya. Sedangkan teori Corbett dapat digunakan untuk ops. Laut di Ambalat dengan Fleet in Being. Baik teori Mahan atau Corbett keduanya masih relevan untuk mendukung SPMI dalam hal ini SPLN. Ini menjawab pertanyaan penelitian bahwa SPMI adalah SPLN dengan menggunakan teori Mahan dan Corbett yang dimodifikasi dengan manajemen perang modern. Sedangkan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang kedua adalah SPMI dalam menghadapi provokasi Malaysia di Ambalat adalah dengan Gun Boat diplomacy melalui naval presence dengan melaksanakan Operasi pengendalian Ambalat, gabungan dari KRI dan pesud didukung oleh pangkalan Aju di Tarakan, Nunukan, Bitung, Palu, Balikpapan dan pangkalan induk di Surabaya.
6. Provokasi Malaysia di Ambalat nampaknya masih sulit diatasi karena Malaysia menggunakan strategi komprehensif dan merasa kekuatan angkatan bersenjata mereka lebih unggul dari Indonesia. Indonesia harus menerapkan strategi komprehensif dengan melibatkan unsur TNI dan non-TNI atau seluruh instrumen kekuatan nasional (DIME) dan bertekad Ambalat adalah milik NKRI. Dari balance teori, penambahan anggaran belanja pertahanan Malaysia mau tidak mau harus diimbangi oleh peningkatan anggaran pertahanan Malaysia agar deterrence strategy tercapai. Perimbangan dua kekuatan akan menciptakan kedamaian karena tujuan utama strategi adalah damai, sehingga akan menguntungkan Indonesia bahwa selama ini pengelolaan Ambalat dibawah pemerintah Indonesia

Saran:

1. Pemerintah disamping melaksanakan strategi diplomasi tetap tidak menarik naval *presence*/kehadiran TNI AL di Ambalat. Oleh karena itu menyarankan pemerintah menggunakan strategi komprehensif minimal DIME, guna tetap memiliki Ambalat
2. Pemerintah perlu menambah anggaran belanja militer agar mempunyai kekuatan laut dan udara yang handal sehingga *deterrence strategy* di Ambalat dapat berhasil
3. Pemerintah segera melengkapi UU komcad, pendukung, mobilisasi demobilisasi, serta keamanan nasional
4. SPLN agar segera disahkan menjadi SPMI. Berupa Permenhan, Perpang TNI dan Skep Kasal
5. Agar penyelesaian kasus Ambalat dapat ditangani secara komprehensif, Pemerintah secepatnya melakukan revisi terhadap PP nomor 38 Tahun 2002
6. Sesuai dengan UNCLOS 1982 pada pasal 16 menyebutkan bahwa : Negara pantai harus memberikan pengumuman sebagai mana mestinya mengenai peta atau daftar koordinat geografis tersebut dan mendepositkan satu copy/turunan peta atau daftar tersebut kepada Sekretaris Jenderal PBB. Persyaratan pada UNCLOS 1982 tersebut tentunya perlu segera ditindak lanjuti oleh Pemerintah agar tidak kalah langkah dengan Malaysia yang sampai saat ini dikenal *sangat licik* dengan langkah-langkah strategisnya. Langkah berikutnya adalah pemerintah segera merampungkan *konsep undang-undang perbatasan NKRI* lengkap dengan peta wilayah kedaulatan sebagai lampirannya, untuk memberikan kepastian hukum.